



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang selanjutnya disingkat SKPD Tertentu, adalah SKPD yang dinilai khusus dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja berdasarkan pada bobot pegawai, kinerja pegawai, kinerja SKPD serta nilai tetap.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Bobot Pegawai, adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan/ruang untuk jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total pegawai Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggungjawab atas pekerjaan.
11. Kinerja Pegawai, adalah unjuk kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang penilaiannya dilaksanakan bulanan dengan berdasar pada tingkat disiplin kerja.
12. Disiplin Kerja Pegawai, adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai, adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai terendah.
14. Jabatan, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah.
15. Capaian kinerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas pokok/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).

16. Orientasi pelayanan, adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau SKPD lain.
17. Kerjasama, adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta SKPD lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
18. Kepemimpinan, adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk memotifasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
19. Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
20. Tambahan Penghasilan Berdasar Tempat Bertugas, adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan dan daerah terpencil.
21. Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja, adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko bahaya baik fisik maupun mental.
22. Pengelola Kepegawaian, adalah Pejabat dan Operator yang bertanggungjawab atas operasionalisasi presensi pegawai di lingkup SKPD.
23. Mutasi, adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
24. Tim Teknis, adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah serta Bagian Pengelolaan dan Pengadaaan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dan unsur SKPD lainnya yang dianggap perlu.
25. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya .
27. Dana Kapitasi, adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PENENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan Kinerja Pegawai dan Kinerja SKPD dimana pegawai tersebut bertugas, dihitung setiap bulan berdasarkan :

- a. bobot pegawai ;
- b. kinerja pegawai ;
- c. kinerja SKPD ;
- d. nilai tetap.

Pasal 4

- (1) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggungjawab.
- (2) Unsur-Unsur klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemampuan kepemimpinan ;
 - b. pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif) ;
 - c. pemikiran yang kompleks ;
 - d. kemampuan manajerial ;

- e. pengawasan (supervisi) ;
 - f. keahlian teknis ;
 - g. keterampilan teknis ;
 - h. pemikiran yang sederhana ;
 - i. pekerjaan berulang-ulang (rutin) dan administratif ; dan
 - j. kekuatan fisik.
- (3) Penetapan bobot pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

- (1) SKPD tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, dinilai memiliki beban kerja yang lebih ;
 - b. Kecamatan Sukapura, Sumber, Tiris, Krucil, Gading, Kotaanyar, Kuripan, Lumbang dan Pakuniran dinilai berdasarkan tempat dan kondisi kerja yang lebih.
- (3) Tambahan Bobot Pegawai pada SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kriteria Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diukur berdasar dari tingkat kedisiplinan pegawai.
- (2) Tingkat kedisiplinan pegawai diukur berdasarkan frekuensi ketidakhadiran, ketidakhadiran tanpa bukti keterangan yang sah dan keterlambatan datang dan atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan serta tingkat hukuman kedisiplinan pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Total dari nilai prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pengurang dari bobot kinerja pegawai.

- (4) Penilaian tingkat kedisiplinan pegawai mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.
- (6) Rekapitulasi Hasil Penilaian tingkat kedisiplinan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Kriteria kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. aspek perencanaan ;
 - b. aspek pengawasan ;
 - c. aspek pengelolaan keuangan;
 - d. aspek pengelolaan sumberdaya manusia ; dan
 - e. aspek pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Aspek kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam Sub Aspek, Indikator Penilaian, Bobot, Tingkat Kesesuaian dan Nilai bobot SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja SKPD dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dengan data bulanan dan atau tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan SKPD, menggunakan format sebagaimana Lampiran III huruf B, C, D, E dan F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja SKPD diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Hasil penilaian kinerja SKPD secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 9

Nilai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Penentuan bobot pegawai dan nilai tetap disusun oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan besar tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum dan fungsional tertentu serta ketersediaan anggaran.
- (2) Penentuan Kinerja Pegawai melalui pengisian format rekapitulasi presensi pegawai dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD dan disahkan oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (3) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Penentuan kinerja SKPD melalui pengisian format rekapitulasi aspek kinerja SKPD yang pengesahannya sebagai berikut :
 - a. Aspek pengawasan SKPD disahkan oleh Inspektur ;
 - b. Aspek perencanaan dan pelaporan SKPD disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia SKPD disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;
 - d. Aspek pengelolaan keuangan SKPD disahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - e. Aspek pengelolaan barang milik Daerah disahkan oleh Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan.
- (5) Format rekapitulasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah paling lama pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, sebagai dasar menyusun rekapitulasi kinerja SKPD yang pengesahannya oleh Sekretaris Daerah.

- (6) Format rekapitulasi kinerja SKPD yang sudah disahkan oleh Sekretaris Daerah, dikirim ke masing-masing SKPD sebelum tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya untuk dijadikan pedoman SKPD dalam menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (7) Format Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai disahkan oleh Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (8) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dibebankan pada Kode Rekening Belanja Tidak Langsung Pos Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (9) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi atas dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk diterbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V PEROLEHAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan setiap bulan pada Minggu Ketiga di bulan berikutnya setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja SKPD, dikecualikan untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bulan ke 12 (dua belas) diberikan pada minggu ketiga bulan Januari Tahun berikutnya.
- (2) Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung dari perkalian antara Bobot Pegawai, Prosentase Kinerja Pegawai dan Prosentase Kinerja SKPD serta Nilai Tetap.

BAB VI PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila :

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara ;
- b. menjalani cuti melahirkan ;
- c. menjalankan diklat lebih dari 6 (enam) bulan ;
- d. menjalani bebas tugas ;

- e. dibebaskan sementara dari jabatan organik karena diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa ;
- f. menjalani hukuman disiplin kepegawaian pada tingkat berat;
- g. menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena penahanan oleh Instansi yang berwenang.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SKPD wajib menyusun dan melaporkan rekapitulasi presensi, rekapitulasi catatan hukuman kedisiplinan pegawai dilingkup SKPD masing-masing kepada Kepala Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 4 (*empat*) bulan berikutnya.
- (2) Tim Teknis wajib melaksanakan evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai setiap 3 (*tiga*) bulan dan laporan tahunan kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Fungsional tertentu diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ;
 - b. Bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) yang telah mendapatkan jasa pelayanan (Jaspel) dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai ;
 - c. Bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) di lingkup SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang telah mendapatkan jasa medis dari pelayanan kesehatan umum dan dana kapitasi tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai dikecualikan Bagi Paramedis dan Bidan Desa yang bertugas di daerah Sulit diberikan tambahan bobot pegawai sebesar 1 point. Penetapan Daerah Sulit bidang kesehatan diatur tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka perhitungan dan penyaluran tambahan penghasilan pegawai bagi paramedis dan bidan desa dimaksud.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup SKPD Dinas Pendapatan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas diberikan 50% (lima puluh persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Jasa Manajemen dari pelayanan kesehatan umum dan Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup SKPD Satuan Polisi Pamong Praja diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Uang Lauk Pauk.
- (5) Kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Pejabat dan Staf Struktural Daerah yang ditugaskan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo dipertimbangkan dari kinerja Bagian Umum.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Staf Fungsional Umum yang diangkat sebagai Sekretaris Desa diberikan tambahan bobot pegawai sebesar 0,5 point dengan pertimbangan beban tugas dan fungsinya.
- (7) Mutasi antar SKPD dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai diberikan sesuai kinerja SKPD lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pegawai pada SKPD lama dan baru.
- (8) Mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan Tambahan Penghasilan mulai 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (9) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada SKPD vertikal di daerah ditetapkan sama dengan penilaian kinerja SKPD yang sesuai bidang kewenangannya.
- (10) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI PROBOLINGGO 


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 12 Februari 2015 Nomor 19 Seri G1.

Sekretaris Daerah 


H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

PENETAPAN BOBOT PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DAN ASPEK YANG DINILAI

| NO | JABATAN | ASPEK YG DINILAI | | | | | | | | | | Kompleksitas pelaksanaan kerja | Cangkup pelaksanaan tugas | Risiko | Tanggung jawab | BOBOT PEGAWAI |
|----|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| | | UNSUR KLASIFIKASI JABATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pekerjaan yg lebih menuntut kepemimpinan | Pekerjaan yang lebih menuntut pendidikan yang luas dan mendalam (komprehensif) | Pekerjaan yang lebih menuntut penarikan yang kompleks | Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial | Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi) | Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis | Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis | Pekerjaan yang lebih menuntut penarikan yang sederhana | Pekerjaan yang berulang ulang (rutin dan administratif) | Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/ keterampilan/ dan ketahanan fisik) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Eselon II a (Sekda) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Eselon II b (Asisten) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | Eselon II b (Staf ahli) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 0.5 | 1.5 | 12 |
| 4 | Eselon II b (Ka SKPD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Eselon III a (Camat/ Ka SKPD/ Kabag lingkup Setda) | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.5 | | | | | | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 |
| 6 | Eselon III a (Kabag/ Sekretaris/ Wibun) | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.5 | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 |
| 7 | Eselon III b (Sekcam/ Kabid) | 1 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
| 8 | Fungsional tertentu Gol IV/c - IV/d | | 0.5 | 1 | | 0.5 | 1 | 1 | | | | | | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 9 | Eselon IV a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 10 | Fungsional tertentu Gol IV/a-IV/b | | 0.3 | 0.25 | | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3.5 |
| 11 | Fungsional Umum Gol IV/a - IV/d | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | | | | | | | 0.25 | 0.5 | 3.5 |
| 12 | Eselon IV b | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | | | | | | | 0.25 | 0.5 | 3.25 |
| 13 | Fungsional tertentu Gol III/c - III/d | | 0.25 | 0.5 | | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 3.25 |
| 14 | Fungsional Umum Gol III/c - III/d | | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.25 | 0.25 | 3.25 |
| 15 | Eselon V | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.25 | 0.25 | 3 |
| 16 | Fungsional tertentu Gol III/a - III/b | | 0.25 | 0.25 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | | 0.25 | 0.25 | 3 |
| 17 | Fungsional Umum Gol III/a - III/b | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | | | | 0.25 | 0.25 | 3 |
| 18 | Fungsional tertentu Gol II/c - II/d | | 0.25 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | | | 0.25 | 0.25 | 2.75 |
| 19 | Fungsional Umum Gol II/c - II/d | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | | | 0.25 | 0.25 | 2.75 |
| 20 | CPNS Gol III | | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | 0.25 | 2.5 |
| 21 | Fungsional tertentu Gol II/a - II/b | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | | | | 0.25 | 2.5 |
| 22 | Fungsional Umum Gol II/a - II/b | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | | | | 0.25 | 2.5 |
| 23 | Fungsional tertentu Gol I/c - I/d | | | | | | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.25 | 2.25 |
| 24 | Fungsional Umum Gol I/c - I/d | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.25 | 2.25 |
| 25 | CPNS Gol II | | | | | | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.25 | 2 |
| 26 | Fungsional tertentu Gol I/a - I/b | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.25 | 2 |
| 27 | Fungsional Umum Gol I/a - I/b | | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.25 | 1.75 |
| 28 | CPNS Gol I | | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | | | | | 0.2 | 1 |

BUPATI PROBOLINGGO


 H.J. P. TANTRIANASARI, SE

LAMPIRAN I.B PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 Februari 2015

PENETAPAN BOBOT PECAHAWAI BAKI SKPD TERTENTU

| NO | JABATAN | ASPEK YG DIPERTIMBANGKAN | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|-------------|---------|------|------|-------------|--------------|--|---|
| | | BERLAKU UMUM SESUAI LAMPIRAN I.A | SEKRETARIAT DPRD | INSPEKTORAT | BAPPEDA | BKD | DPKD | BAGIAN UMUM | BAGIAN HUKUM | BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN | Sekapura, Sumber, Tiris, Krcil, Gading, Kotanayar, Kuripan, Lumbang, Paknirua |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Eselon II a (Sekda) | 20 | | | | | | | | | |
| 2 | Eselon II b (Asisten) | 15 | | | | | | | | | |
| 3 | Eselon II b (Staf ahli) | 12 | | | | | | | | | |
| 4 | Eselon II b (Ka SKPD) | 13 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 5 | Eselon III a (Camat/Ka SKPD/Kabag lingkup- Setda) | 8 | | | | | | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 6 | Eselon III a (Kabag/Sekretaris/irban) | 7.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 7 | Eselon III b (sekcam/kabid) | 6.5 | | | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | 2.75 |
| 8 | Fungsional tertentu Gol IV/c- IV/d | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| 9 | Eselon IV a | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Fungsional tertentu Gol IV/a-IV/b | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Fungsional Umum Gol IV/a- IV/d | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Eselon IV b | 3.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 13 | Fungsional tertentu Gol III/c- III/d | 3.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 14 | Fungsional Umum Gol III/c- III/d | 3.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 15 | Eselon V | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 16 | Fungsional tertentu Gol III/a- III/b | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 17 | Fungsional Umum Gol III/a- III/b | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 18 | Fungsional tertentu Gol II/c- II/d | 2.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Fungsional Umum Gol II/c- II/d | 2.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | CPNS Gol III | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Fungsional tertentu Gol II/a- II/b | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 22 | Fungsional Umum Gol II/a- II/b | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 23 | Fungsional tertentu Gol I/c- I/d | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 24 | Fungsional Umum Gol I/c- I/d | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 25 | CPNS Gol II | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 26 | Fungsional tertentu Gol I/a- I/b | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 27 | Fungsional Umum Gol I/a- I/b | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 28 | CPNS Gol I | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

BUPATI PROBOLINGGO

HJ. P. TANTRIANAGARI, SE

LAMPIRAN II B PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 Februari 2015

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

SKPD :
BULAN :

| NO | NAMA PEGAWAI | IDENTITAS PEGAWAI | | | PRESENSI PEGAWAI | | | | PROSENTASE PENGURANG | | | | KINERJA PEGAWAI |
|----|--------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------|
| | | ESSELON | GOL/RUANG | JABATAN | tidak masuk kerja (hari) | | aktivitas kerja (jam) | | tidak masuk kerja (%) | aktivitas kerja (%) | sanksi disiplin (%) | total | |
| | | | | | ada bukti/ keterangan sah | tdk ada bukti/ keterangan sah | datang terlambat | pulang mendahului | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (=100%-12) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | dst,..... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Probolinggo,20....

Kepala SKPD

Kabupaten Probolinggo

Nama

Nip.

BUPATI PROBOLINGGO



H. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III A : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 Pebruari 2015

ASPEK, INDIKATOR DAN BOBOT KRITERIA KINERJA SKPD

| NO | ASPEK/KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | | TINGKAT KESESUAIAN DAN NILAI BOBOT | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|
| | | | Kriteria | Aspek | tingkat yg dicapai | bobot | tingkat yg dicapai | bobot | tingkat yg dicapai | bobot | | |
| 1 | Aspek Perencanaan dan Pelaporan (SAKIP) | | | 20% | tingkat yg dicapai | bobot | tingkat yg dicapai | bobot | tingkat yg dicapai | bobot | | |
| | a. | Keselarasan dokumen perencanaan | 1. Renstra SKPD dengan RPJMD | | 5% | sesuai | 5% | kurang | 3% | tidak | 1% | |
| | | | 2. Renja SKPD dengan RKPD | | | sesubi | 5% | kurang | 3% | tidak | 1% | |
| | | | 3. indikator hasil RKA dengan Renstra SKPD | | | sesuai | 5% | kurang | 3% | tidak | 1% | |
| | b. | penyusunan renstra dan renja SKPD | ketepatan waktu penyampaian | | 5% | Tepat | 5% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% | |
| | c. | LAKIP | Nilai Dokumen Lakip SKPD | | 5% | sangat baik | 5% | baik | 3% | cukup dan kurang | 1% | |
| d. | Penyampaian Bahan LKPJ | ketepatan waktu penyampaian | 5% | Tepat | 5% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% | | | |
| 2 | Aspek Pengawasan | | | 20% | | | | | | | | |
| | a. | Tingkat Temuan (Internal maupun Eksternal) | kasus yang merugikan daerah | | 2% | tidak ada | 2% | ada/tdk material | 1% | ada & material | 0.5% | |
| | | | kewajiban penyetoran kepada daerah | | 2% | tidak ada | 2% | ada/tdk material | 1% | ada & material | 0.5% | |
| | | | pelanggaran thd peraturan perundangan | | 2% | tidak ada | 2% | ada/tdk material | 1% | ada & material | 0.5% | |
| | | | pelanggaran thd prosedur penganggaran | | 2% | tidak ada | 2% | ada/tdk material | 1% | ada & material | 0.5% | |
| | | | pelanggaran thd prosedur dan tatakerja | | 2% | tidak ada | 2% | ada/tdk material | 1% | ada & material | 0.5% | |
| | | | hambatan thd kelancaran pelaksanaan proyek | | 2% | tidak ada | 2% | ada/tdk material | 1% | ada & material | 0.5% | |
| | | | hambatan thd pelaksanaan tugas pokok | | 1% | tidak ada | 1% | ada/tdk material | 0.5% | ada & material | 0.25% | |
| | | | kelemahan administrasi | | 1% | tidak ada | 1% | ada/tdk material | 0.5% | ada & material | 0.25% | |
| | | | ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat | | 1% | tidak ada | 1% | ada/tdk material | 0.5% | ada & material | 0.25% | |
| | b. | penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | 5% | | selesai ≤ 60 hr | 5% | TL selesai 60-90 hari | 3% | TL selesai ≥90 hr | 1% | | |
| | 3 | Aspek Pengelolaan Keuangan | | | 20% | | | | | | | |
| | | a. | administrasi keuangan | | | ketepatan waktu, keakuratan dalam penyusunan RKA/DPA | 4% | tepat dan akurat | 4% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan |
| ketepatan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja | | | | 4% | | tepat dan akurat | 4% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% | |
| tertib administrasi kas SKPD (rekon bulanan) | | | | 4% | | tepat dan akurat | 4% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% | |
| tertib administrasi persediaan SKPD (rekon bulanan) | | | | 4% | | tepat dan akurat | 4% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% | |
| ketepatan dan keakuratan laporan keuangan SKPD | | | | 4% | | tepat dan akurat | 4% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% | |
| 4 | Aspek Pengelolaan SDM | | | 25% | | | | | | | | |
| a. | administrasi kepegawaian | kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMPEG | 7% | | tepat dan akurat | 7% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 4% | | | | |

| NO | ASPEK/KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | | TINGKAT KESESUAIAN DAN NILAI BOBOT | | | | | |
|----|--|---|----------|-------|------------------------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------|----|
| | | | Kriteria | Aspek | | | | | | |
| | | ketepatan dan keakuratan berkas pengusulan kenaikan pangkat dan berkala | 5% | | tepat dan akurat | 5% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | | |
| | | penyampaian laporan data kepegawaian | 6% | | tepat dan akurat | 6% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | | |
| | | rekapitulasi presensi pegawai | 7% | | tepat dan akurat | 7% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 4% | | |
| 5 | Aspek Pengelolaan Barang | | | 15% | | | | | | |
| a. | administrasi barang milik daerah (asset) | keberadaan dan kelengkapan kartu inventaris ruangan | 3% | | ada, lengkap dan sesuai | 3% | ada, tetapi tidak sesuai | 2% | tidak ada | 1% |
| | | keberadaan kartu inventaris barang | 3% | | ada, lengkap dan sesuai | 3% | ada, tetapi tidak sesuai | 2% | tidak ada | 1% |
| | | kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMDA BARANG | 4% | | tepat dan akurat | 4% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% |
| | | tertib administrasi barang/aset SKPD (rekon bulanan) | 5% | | tepat dan akurat | 5% | 5-10 hari dr wkt yang ditetapkan | 3% | > 10 hari yg ditetapkan | 1% |

BUPATI PROBOLINGGO



HJ. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PERENCANAAN SKPD

| NO | NAMA SKPD | PROSENTASE BOBOT KINERJA | | | | | | TOTAL BOBOT KINERJA SKPD |
|----|---|---------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|
| | | Keselarasan dokumen perencanaan | | | penyusunan renstra dan reja SKPD | LAKIP | Penyampaian Bahan LKP? | |
| | | Renstra SKPD dengan RPJMD | Renja SKPD dengan RKPD | Indikator hasil RKA dengan Renstra SKPD | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= (total 3 s/d 8) |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | |
| 2 | INSPEKTORAT | | | | | | | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | |
| 5 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS | | | | | | | |
| 6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 7 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 8 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP | | | | | | | |
| 9 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB | | | | | | | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | | | | | |
| 13 | DINAS PERTANIAN | | | | | | | |
| 14 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | |
| 15 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | |
| 16 | DINAS PU BINAMARGA | | | | | | | |
| 17 | DINAS PU PENGAIRAN | | | | | | | |
| 18 | DINAS PU CIPTA KARYA | | | | | | | |
| 19 | DINAS SOSIAL | | | | | | | |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | |
| 23 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | |
| 24 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | |
| 25 | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | | | | |
| 26 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | |
| 27 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | | | |
| 28 | DINAS PERIKANAN & KELAUTAN | | | | | | | |
| 29 | RSUD WALUYO JATI | | | | | | | |
| 30 | RSUD TONGAS | | | | | | | |
| 31 | KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | | |
| 32 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | |
| 33 | KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERUMAHAN | | | | | | | |
| 34 | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | | | | |
| 35 | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | | | | | | | |
| 36 | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| 37 | BAGIAN PENYUSUNAN PROG. | | | | | | | |
| 38 | BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI | | | | | | | |
| 39 | BAGIAN KESRA | | | | | | | |
| 40 | BAGIAN UMUM | | | | | | | |
| 41 | BAGIAN PROTOKOL & RT | | | | | | | |
| 42 | BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN | | | | | | | |
| 43 | BAGIAN ORGANISASI | | | | | | | |
| 44 | BAGIAN HUKUM | | | | | | | |
| 45 | KECAMATAN DRINGU | | | | | | | |
| 46 | KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | | | |
| 47 | KECAMATAN GADING | | | | | | | |
| 48 | KECAMATAN LUMBANG | | | | | | | |
| 49 | KECAMATAN TIRIS | | | | | | | |
| 50 | KECAMATAN BESUK | | | | | | | |
| 51 | KECAMATAN GENDING | | | | | | | |
| 52 | KECAMATAN KREJENGAN | | | | | | | |
| 53 | KECAMATAN PAJARAKAN | | | | | | | |
| 54 | KECAMATAN SUMBER | | | | | | | |
| 55 | KECAMATAN KRUCIL | | | | | | | |
| 56 | KECAMATAN TONGAS | | | | | | | |
| 57 | KECAMATAN TEGALSIWALAN | | | | | | | |
| 58 | KECAMATAN WONOMERTO | | | | | | | |
| 59 | KECAMATAN LECES | | | | | | | |
| 60 | KECAMATAN SUKAPURA | | | | | | | |
| 61 | KECAMATAN MARON | | | | | | | |
| 62 | KECAMATAN BANYUANYAR | | | | | | | |
| 63 | KECAMATAN KOTAANYAR | | | | | | | |
| 64 | KECAMATAN SUMBERASIH | | | | | | | |
| 65 | KECAMATAN KURIPAN | | | | | | | |
| 66 | KECAMATAN BANTARAN | | | | | | | |
| 67 | KECAMATAN PAITON | | | | | | | |
| 68 | KECAMATAN PAKUNIRAN | | | | | | | |
| 69 | KELURAHAN SEMAMPIR | | | | | | | |
| 70 | KELURAHAN KANDANG JATI KULON | | | | | | | |
| 71 | KELURAHAN SIDOMUKTI | | | | | | | |
| 72 | KELURAHAN PATOKAN | | | | | | | |
| 73 | KELURAHAN KRAKSAAN WETAN | | | | | | | |

Probolinggo, 20.....
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama,
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


H. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PENGAWASAN SKPD

| no | SKPD | Jumlah Temuan | | | | | | | | | TOTAL BOBOT KINERJA SKPD |
|----|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| | | kasus yang merugikan daerah | kewajiban penyetoran kepada daerah | pelanggaran thd peraturan perundangan | pelanggaran thd prosedur dan tatakerja | hambatan thd kelancaran pelaksanaan proyek | hambatan thd pelaksanaan tugas pokok | kelemahan administrasi | ketidaktan caran pelayanan kepada | penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= (total 3 s/d 11) |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | |
| 2 | INSPEKTORAT | | | | | | | | | | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 5 | BADAN KESDANGPOL DAN LINMAS | | | | | | | | | | |
| 6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| 7 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 8 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP | | | | | | | | | | |
| 9 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB | | | | | | | | | | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| 13 | DINAS PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 14 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 15 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 16 | DINAS PU BINAMARGA | | | | | | | | | | |
| 17 | DINAS PU PENGAIRAN | | | | | | | | | | |
| 18 | DINAS PU CIPTA KARYA | | | | | | | | | | |
| 19 | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | | | | |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | |
| 23 | DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | |
| 24 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | |
| 25 | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | | | | | | | |
| 26 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | | | | |
| 27 | DINAS KERUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| 28 | DINAS PERIKANAN & KELAUTAN | | | | | | | | | | |
| 29 | RSUD WALLYO JATI | | | | | | | | | | |
| 30 | RSUD TONGAS | | | | | | | | | | |
| 31 | KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | | | | | |
| 32 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | | | |
| 33 | KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERUMAHAN | | | | | | | | | | |
| 34 | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | | | | | | | |
| 35 | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | | | | | | | | | | |
| 36 | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| 37 | BAGIAN PENYUSUNAN PROG. | | | | | | | | | | |
| 38 | BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI | | | | | | | | | | |
| 39 | BAGIAN KESRA | | | | | | | | | | |
| 40 | BAGIAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 41 | BAGIAN PROTOKOL & RT | | | | | | | | | | |
| 42 | BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN | | | | | | | | | | |
| 43 | BAGIAN ORGANISASI | | | | | | | | | | |
| 44 | BAGIAN HUKUM | | | | | | | | | | |
| 45 | KECAMATAN DRINGU | | | | | | | | | | |
| 46 | KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | | | | | | |
| 47 | KECAMATAN GADING | | | | | | | | | | |
| 48 | KECAMATAN LUMBANG | | | | | | | | | | |
| 49 | KECAMATAN TIRIS | | | | | | | | | | |
| 50 | KECAMATAN BESUK | | | | | | | | | | |
| 51 | KECAMATAN GENDING | | | | | | | | | | |
| 52 | KECAMATAN KREJENGAN | | | | | | | | | | |
| 53 | KECAMATAN PAJARAKAN | | | | | | | | | | |
| 54 | KECAMATAN SUMBER | | | | | | | | | | |
| 55 | KECAMATAN KRUCIL | | | | | | | | | | |
| 56 | KECAMATAN TONGAS | | | | | | | | | | |
| 57 | KECAMATAN TEGALSIWALAN | | | | | | | | | | |
| 58 | KECAMATAN WONOMERTO | | | | | | | | | | |
| 59 | KECAMATAN LECES | | | | | | | | | | |
| 60 | KECAMATAN SUKAPURA | | | | | | | | | | |
| 61 | KECAMATAN MARON | | | | | | | | | | |
| 62 | KECAMATAN BANYUANYAR | | | | | | | | | | |
| 63 | KECAMATAN KOTAANYAR | | | | | | | | | | |
| 64 | KECAMATAN SUMBERASIH | | | | | | | | | | |
| 65 | KECAMATAN KURIPAN | | | | | | | | | | |
| 66 | KECAMATAN BANTARAN | | | | | | | | | | |
| 67 | KECAMATAN PATON | | | | | | | | | | |
| 68 | KECAMATAN PAKUNIRAN | | | | | | | | | | |
| 69 | KELURAHAN SEMAMPIR | | | | | | | | | | |
| 70 | KELURAHAN KANDANG JATI KULON | | | | | | | | | | |
| 71 | KELURAHAN SIDOMUKTI | | | | | | | | | | |
| 72 | KELURAHAN PATOKAN | | | | | | | | | | |
| 73 | KELURAHAN KRAKSAAN WETAN | | | | | | | | | | |

Probolinggo, 20.....
Inspektur
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


HJ. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

| NO | NAMA SKPD | Administrasi Keuangan | | | | | TOTAL BOBOT KINERJA SKPD |
|----|--|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | ketepatan waktu, keakuratan dalam penyusunan EKA/DPA | ketepatan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja | tertib administrasi kas SKPD (rekon bulanan) | tertib administrasi persediaan SKPD (rekon bulanan) | ketepatan dan keakuratan laporan keuangan SKPD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (total 3 s/d 7) |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | |
| 2 | INSPEKTORAT | | | | | | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | |
| 5 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS | | | | | | |
| 6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | |
| 7 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| 8 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP | | | | | | |
| 9 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB | | | | | | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | | | | |
| 13 | DINAS PERTANIAN | | | | | | |
| 14 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | |
| 15 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| 16 | DINAS PU BINAMARGA | | | | | | |
| 17 | DINAS PU PENGARAH | | | | | | |
| 18 | DINAS PU CIPTA KARYA | | | | | | |
| 19 | DINAS SOSIAL | | | | | | |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | |
| 23 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | |
| 24 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| 25 | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | | | |
| 26 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | |
| 27 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | | |
| 28 | DINAS PERIKANAN & KELAUTAN | | | | | | |
| 29 | RSUD WALUYO JATI | | | | | | |
| 30 | RSUD TONGAS | | | | | | |
| 31 | KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | |
| 32 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | |
| 33 | KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERLJINAN | | | | | | |
| 34 | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | | | |
| 35 | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | | | | | | |
| 36 | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 37 | BAGIAN PENYUSUNAN PROG. | | | | | | |
| 38 | BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI | | | | | | |
| 39 | BAGIAN KESRA | | | | | | |
| 40 | BAGIAN UMUM | | | | | | |
| 41 | BAGIAN PROTOKOL & RT | | | | | | |
| 42 | BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN | | | | | | |
| 43 | BAGIAN ORGANISASI | | | | | | |
| 44 | BAGIAN HUKUM | | | | | | |
| 45 | KECAMATAN DRINGU | | | | | | |
| 46 | KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | | |
| 47 | KECAMATAN GADING | | | | | | |
| 48 | KECAMATAN LUMBANG | | | | | | |
| 49 | KECAMATAN TIRIS | | | | | | |
| 50 | KECAMATAN BESUK | | | | | | |
| 51 | KECAMATAN GENDING | | | | | | |
| 52 | KECAMATAN KREJENGAN | | | | | | |
| 53 | KECAMATAN PAJARAKAN | | | | | | |
| 54 | KECAMATAN SUMBER | | | | | | |
| 55 | KECAMATAN KRUCIL | | | | | | |
| 56 | KECAMATAN TONGAS | | | | | | |
| 57 | KECAMATAN TEGALSIWALAN | | | | | | |
| 58 | KECAMATAN WONOMERTO | | | | | | |
| 59 | KECAMATAN LECES | | | | | | |
| 60 | KECAMATAN SUKAPURA | | | | | | |
| 61 | KECAMATAN MARON | | | | | | |
| 62 | KECAMATAN BANYUANYAR | | | | | | |
| 63 | KECAMATAN KOTAANYAR | | | | | | |
| 64 | KECAMATAN SUMBERASIH | | | | | | |
| 65 | KECAMATAN KURIPAN | | | | | | |
| 66 | KECAMATAN BANTARAN | | | | | | |
| 67 | KECAMATAN PAITON | | | | | | |
| 68 | KECAMATAN PAKUNIRAN | | | | | | |
| 69 | KELURAHAN SEMAMPIR | | | | | | |
| 70 | KELURAHAN KANDANG JATI KULON | | | | | | |
| 71 | KELURAHAN SIDOMUKTI | | | | | | |
| 72 | KELURAHAN PATOKAN | | | | | | |
| 73 | KELURAHAN KRAKSAAN WETAN | | | | | | |

Probolinggo, 20....
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama,
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


H. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SKPD

| NO | NAMA SKPD | Administrasi Sumberdaya Manusia SKPD | | | | TOTAL BOBOT KINERJA SKPD |
|----|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMPEG | ketepatan dan keakuratan berkas pengusulan kenaikan pangkat dan berkala | penyampaian laporan data kepegawaian | rekapitulasi presensi pegawai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (total 3 s/d 6) |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| 2 | INSPEKTORAT | | | | | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | |
| 5 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS | | | | | |
| 6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | |
| 7 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 8 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP | | | | | |
| 9 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB | | | | | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | | | |
| 13 | DINAS PERTANIAN | | | | | |
| 14 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| 15 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| 16 | DINAS PU BINAMARGA | | | | | |
| 17 | DINAS PU PENGAIRAN | | | | | |
| 18 | DINAS PU Cipta Karya | | | | | |
| 19 | DINAS SOSIAL | | | | | |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | |
| 23 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | |
| 24 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| 25 | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | | |
| 26 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | |
| 27 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | |
| 28 | DINAS PERIKANAN & KELAUTAN | | | | | |
| 29 | RSUD WALLUYO JATI | | | | | |
| 30 | RSUD TONGAS | | | | | |
| 31 | KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | |
| 32 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | |
| 33 | KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERLUNAN | | | | | |
| 34 | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | | |
| 35 | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | | | | | |
| 36 | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 37 | BAGIAN PENYUSUNAN PROG | | | | | |
| 38 | BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI | | | | | |
| 39 | BAGIAN KESRA | | | | | |
| 40 | BAGIAN UMUM | | | | | |
| 41 | BAGIAN PROTOKOL & RT | | | | | |
| 42 | BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN | | | | | |
| 43 | BAGIAN ORGANISASI | | | | | |
| 44 | BAGIAN HUKUM | | | | | |
| 45 | KECAMATAN DRINGU | | | | | |
| 46 | KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | |
| 47 | KECAMATAN GADING | | | | | |
| 48 | KECAMATAN LUMBANG | | | | | |
| 49 | KECAMATAN TIRIS | | | | | |
| 50 | KECAMATAN BESUK | | | | | |
| 51 | KECAMATAN GENDING | | | | | |
| 52 | KECAMATAN KREJENGAN | | | | | |
| 53 | KECAMATAN PAJARAKAN | | | | | |
| 54 | KECAMATAN SUMBER | | | | | |
| 55 | KECAMATAN KRUCIL | | | | | |
| 56 | KECAMATAN TONGAS | | | | | |
| 57 | KECAMATAN TEGALSIWALAN | | | | | |
| 58 | KECAMATAN WONOMERTO | | | | | |
| 59 | KECAMATAN LEDES | | | | | |
| 60 | KECAMATAN SUKAPURA | | | | | |
| 61 | KECAMATAN MARON | | | | | |
| 62 | KECAMATAN BANYUANYAR | | | | | |
| 63 | KECAMATAN KOTAANYAR | | | | | |
| 64 | KECAMATAN SUMBERASIH | | | | | |
| 65 | KECAMATAN KURIPAN | | | | | |
| 66 | KECAMATAN BANTARAN | | | | | |
| 67 | KECAMATAN PAITON | | | | | |
| 68 | KECAMATAN PAKUNIRAN | | | | | |
| 69 | KELURAHAN SEMAMPIR | | | | | |
| 70 | KELURAHAN KANDANG JATI KULON | | | | | |
| 71 | KELURAHAN SIDOMUKTI | | | | | |
| 72 | KELURAHAN PATOKAN | | | | | |
| 73 | KELURAHAN KRAKSAAN WETAN | | | | | |

Probolinggo, 20....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


HJ. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI BOBOT KINERJA ASPEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SETDA

| NO | NAMA SKPD | Administrasi Barang Milik Daerah | | | | TOTAL BOBOT KINERJA SKPD |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | keberadaan dan kelengkapan kartu inventaris ruangan | keberadaan kartu inventaris barang | kelengkapan pembaruan (update) bulanan data SIMDA BARANG | tertib administrasi barang/aset SKPD (rekon bukaan) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (total 3 s/d 6) |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| 2 | INSPEKTORAT | | | | | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | |
| 5 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS | | | | | |
| 6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | |
| 7 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 8 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP | | | | | |
| 9 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB | | | | | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | | | |
| 13 | DINAS PERTANIAN | | | | | |
| 14 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| 15 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| 16 | DINAS PU BINAMARGA | | | | | |
| 17 | DINAS PU PENGAIRAN | | | | | |
| 18 | DINAS PU Cipta Karya | | | | | |
| 19 | DINAS SOSIAL | | | | | |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | |
| 23 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | |
| 24 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| 25 | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | | |
| 26 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | |
| 27 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | |
| 28 | DINAS PERIKANAN & KELAUTAN | | | | | |
| 29 | RSUD WALUYO JATI | | | | | |
| 30 | RSUD TONGAS | | | | | |
| 31 | KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | |
| 32 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | |
| 33 | KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN | | | | | |
| 34 | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | | |
| 35 | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | | | | | |
| 36 | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 37 | BAGIAN PENYUSUNAN PROG. | | | | | |
| 38 | BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI | | | | | |
| 39 | BAGIAN KESRA | | | | | |
| 40 | BAGIAN UMUM | | | | | |
| 41 | BAGIAN PROTOKOL & RT | | | | | |
| 42 | BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN | | | | | |
| 43 | BAGIAN ORGANISASI | | | | | |
| 44 | BAGIAN HUKUM | | | | | |
| 45 | KECAMATAN DRINGU | | | | | |
| 46 | KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | |
| 47 | KECAMATAN GADING | | | | | |
| 48 | KECAMATAN LUMBANG | | | | | |
| 49 | KECAMATAN TIRIS | | | | | |
| 50 | KECAMATAN BESUK | | | | | |
| 51 | KECAMATAN GENDING | | | | | |
| 52 | KECAMATAN KREJENGAN | | | | | |
| 53 | KECAMATAN PAJARAKAN | | | | | |
| 54 | KECAMATAN SUMBER | | | | | |
| 55 | KECAMATAN KRUCIL | | | | | |
| 56 | KECAMATAN TONGAS | | | | | |
| 57 | KECAMATAN TEGALSIWALAN | | | | | |
| 58 | KECAMATAN WONOMERTO | | | | | |
| 59 | KECAMATAN LECES | | | | | |
| 60 | KECAMATAN SUKAPURA | | | | | |
| 61 | KECAMATAN MARON | | | | | |
| 62 | KECAMATAN BANYUANYAR | | | | | |
| 63 | KECAMATAN KOTAANYAR | | | | | |
| 64 | KECAMATAN SUMBERASIH | | | | | |
| 65 | KECAMATAN KURIPAN | | | | | |
| 66 | KECAMATAN SANTARAN | | | | | |
| 67 | KECAMATAN PATTON | | | | | |
| 68 | KECAMATAN PAKUNIRAN | | | | | |
| 69 | KELURAHAN SEMAMPIR | | | | | |
| 70 | KELURAHAN KANDANG JATI KULON | | | | | |
| 71 | KELURAHAN SIDOMUKTI | | | | | |
| 72 | KELURAHAN PATOKAN | | | | | |
| 73 | KELURAHAN KRAKSAAN WETAN | | | | | |

Probolinggo,20...
Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan Setda
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


H. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI BOBOT KINERJA SKPD

| NO | NAMA SKPD | Administrasi Keuangan | | | | | TOTAL BOBOT KINERJA SKPD |
|----|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | ASPEK PERENCANAAN SKPD | ASPEK PENGAWASAN SKPD | ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD | ASPEK PENGELOLAAN SDM SKPD | ASPEK PENGELOLAAN BMD SKPD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (total 2 s/d 7) |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | |
| 2 | INSPEKTORAT | | | | | | |
| 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | |
| 5 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS | | | | | | |
| 6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | |
| 7 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| 8 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PPP | | | | | | |
| 9 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN KB | | | | | | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | | | | |
| 13 | DINAS PERTANIAN | | | | | | |
| 14 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | |
| 15 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| 16 | DINAS PU BINAMARGA | | | | | | |
| 17 | DINAS PU PENGAIRAN | | | | | | |
| 18 | DINAS PU Cipta Karya | | | | | | |
| 19 | DINAS SOSIAL | | | | | | |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAJATAN SIPIL | | | | | | |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | |
| 23 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| 24 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| 25 | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | | | |
| 26 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | |
| 27 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | | | | |
| 28 | DINAS PERIKANAN & KELAUTAN | | | | | | |
| 29 | RSUD WALUYO JATI | | | | | | |
| 30 | RSUD TONGAS | | | | | | |
| 31 | KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | |
| 32 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | |
| 33 | KANTOR PENAHAMAN MODAL DAN PERJINJAH | | | | | | |
| 34 | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | | | |
| 35 | KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | | | | | | |
| 36 | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 37 | BAGIAN PENYUSUNAN PROG. | | | | | | |
| 38 | BAGIAN KOMUNIKASI & INFORMASI | | | | | | |
| 39 | BAGIAN KESRA | | | | | | |
| 40 | BAGIAN UMUM | | | | | | |
| 41 | BAGIAN PROTOKOL & RT | | | | | | |
| 42 | BAGIAN PENGELOLAAN & PENGADAAN | | | | | | |
| 43 | BAGIAN ORGANISASI | | | | | | |
| 44 | BAGIAN HUKUM | | | | | | |
| 45 | KECAMATAN DRINGU | | | | | | |
| 46 | KECAMATAN KRAKSAAN | | | | | | |
| 47 | KECAMATAN GADING | | | | | | |
| 48 | KECAMATAN LUMBANG | | | | | | |
| 49 | KECAMATAN TIRIS | | | | | | |
| 50 | KECAMATAN BESUK | | | | | | |
| 51 | KECAMATAN GENDING | | | | | | |
| 52 | KECAMATAN KREJENGAN | | | | | | |
| 53 | KECAMATAN PAJARAKAN | | | | | | |
| 54 | KECAMATAN SUMBER | | | | | | |
| 55 | KECAMATAN KRUCIL | | | | | | |
| 56 | KECAMATAN TONGAS | | | | | | |
| 57 | KECAMATAN TEGALSIWALAN | | | | | | |
| 58 | KECAMATAN WONOMERTO | | | | | | |
| 59 | KECAMATAN LECES | | | | | | |
| 60 | KECAMATAN SUKAPURA | | | | | | |
| 61 | KECAMATAN MARON | | | | | | |
| 62 | KECAMATAN BANYUANYAR | | | | | | |
| 63 | KECAMATAN KOTAANYAR | | | | | | |
| 64 | KECAMATAN SUMBERASIH | | | | | | |
| 65 | KECAMATAN KURIPAN | | | | | | |
| 66 | KECAMATAN BANTARAN | | | | | | |
| 67 | KECAMATAN PAITON | | | | | | |
| 68 | KECAMATAN PAKUNIRAN | | | | | | |
| 69 | KELURAHAN SEMAMPIR | | | | | | |
| 70 | KELURAHAN KANDANG JATI KULON | | | | | | |
| 71 | KELURAHAN SIDOMUKTI | | | | | | |
| 72 | KELURAHAN PATOKAN | | | | | | |
| 73 | KELURAHAN KRAKSAAN WETAN | | | | | | |

Probolinggo, 20....
Sekretaris Daerah
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


H. P. TANTRIANA SARI, SE

REKAPITULASI TPP PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

SKPD:
TAHAP

| NO | NAMA PEGAWAI | IDENTITAS PEGAWAI | | | BOBOT PEGAWAI (berlaku umum sesuai lamp. I. A) | BOBOT PEGAWAI (berlaku khusus sesuai lamp. I. B) | KINERJA PEGAWAI | KINERJA SKPD | NILAI TETAP | PENERIMAAN TPP | PPH | TPP DITERIMA | TANDA TANGAN |
|----|--------------|-------------------|-----------|---------|--|--|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-----|--------------|--------------|
| | | ESSELON | GOL/RUANG | JABATAN | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | dst.... | | | | | | | | | | | | |

Probolinggo,20....
Kepala SKPD
Kabupaten Probolinggo

Nama
Nip.

BUPATI PROBOLINGGO


HJ. P. TANTRIANA SARI, SE